

EVALUASI PENERAPAN PENCAIRAN DANA LANGSUNG (LS) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2015 PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK

Petrus Suparman, Dwi Relina

ABSTRAK

Pencairan dana adalah suatu tindakan atau kegiatan menyalurkan, mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu. Hasil Penelitian menunjukkan bawa: Penerapan Pencairan Dana Langsung (LS) pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Tetapi masih ada beberapa kendala dalam proses penerbitan Surat Perintah Membayar Dana Langsung (SPM-LS) untuk Pencairan Belanja Langsung Pengadaan Barang dan Jasa, diantaranya keterlambatan Penyelesaian Dokumen Kontrak.

Kata kunci : Dana Langsung (LS) Belanja Pegawai, Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2015

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. APBD dilaksanakan

dengan baik dan benar, maka landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur prosedur dan teknis pelaksanaan anggaran harus diikuti secara tertib dan taat azas.

Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2015 (2015:15). Penyedia Dana adalah pengeluaran kas atas beban Anggran Pendapatn Belanja

Daerah (APBD) dilakukan berdasarkan Surat Penyedia Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Penyedia Dana (SPD) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) per triwulan sesuai ketersediaan dana.

Perumusan Masalah

“Bagaimana Penerapan pencairan dana langsung (LS) Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik?”.

Tujuan Penelitian

“Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan pencairan dana langsung (LS) Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2015 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik”.

Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi berbagai pihak, agar lebih memahami kegiatan pencairan langsung (LS) dari APBD dan bagaimana penerapannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pengertian Akuntansi

Menurut Accounting Principles Board (1970) dikutip Nurlan Darise dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik (2008:27) Akuntansi adalah kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik dalam membuat pilihan-pilihan

yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan.

Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

Secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor swasta dan akuntansi sektor publik:

1. Akuntansi Komersil/Perusahaan (*Commercial Accounting*)
2. Akuntansi sektor Publik

Sistem Pencatatan

Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. *Single Entry*
2. *Double Entry*
3. *Triple entry*

Siklus Akuntansi

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi dalam Akuntansi Keuangan Daerah (2014) dikutip Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua (2015:5) Akuntansi adalah suatu sistem. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) dan menjadi *output* (keluaran). *Input* sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. *Output*-nya adalah laporan keuangan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dikutip Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua (2015:8-11) tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Paragraf 35-40 menyebut bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat

memenuhi tujuannya. Karakteristik adalah : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (PSAP No.2, paragraf 7) (Erlina, 2015:153).

Definisi Beban

Sementara Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 Paragraf 8) dikutip Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua (2015:154) menyatakan bahwa beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengertian Sistem, Prosedur dan Sistem Akuntansi

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (mulyadi, 2008:5). Sedangkan Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (mulyadi, 2008:5).

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (mulyadi, 2008:3).

Definisi Evaluasi dan Penerapan

Evaluasi adalah proses membuat judgment untuk memutuskan tentang manfaat pendekatan tertentu atau hasil pekerjaan siswa (Richard I. Arends, 2008: 217). Sedangkan definisi penerapan menurut B.N. Marbun dalam Kamus Manajemen (2003:234) penerapan adalah pemanfaatan ketrampilan dan pengetahuan baru di bidang manajemen.

Pengertian Anggaran

Anggaran (*Budget*) adalah suatu rencana tindakan yang disusulkan oleh manajemen secara terinci yang dinyatakan secara formal dalam angka-angka dan sistematis dari seluruh kegiatan yang akan dilakukan dalam perencanaan, koordinasi dan pengendalian, dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam suatu uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (Islahuzzaman, 2012: 28).

Pengertian Dana

Pengertian dana berdasarkan GASB (Governmental Accounting Standart Board) dikutip Sujarweni, V. Wiratna dalam buku Akuntansi sektor Publik (2015:83) adalah kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening saling seimbang untuk membukukan kas dan sumber lainnya bersama-sama dengan hutang, kewajiban-kewajiban, cadangan-cadangan, dan hak milik yang disihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan atau pembatasan-pembatasan yang ada.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2015 (2015:18-21) SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bndahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang pencairan dana langsung :

1. Dela Dewi Ayuningrum (2009) : Sistem dan Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) di Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Surakarta.
2. Chornelia Bella Kusuma (2015) : Analisis Implementasi Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.
3. Edi Muhammad Risal (2015) : Evaluasi Prosedur Pencairan Dana DIPA Secara Langsung (LS) di Direktorat Keuangan UGM

Kerangka Pikir

Berdasarkan judul di atas maka akan diketahui bagaimana penerapan dalam sistem dan prosedur surat perintah membayar (SPM-LS) untuk pembayaran gaji dan tunjangan dan untuk pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik. Dari proses pencatatan sampai proses pencairan dana.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Obyek yang akan di teliti dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik, berlokasi di Jln. Dr. Wahidin SH. No 127 Kabupaten Gresik.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pengkajian karya ilmiah ini adalah kualitatif dengan menggunakan sumber data dokumen yang diperlukan sebagai lampiran proses pencairan dana langsung (LS) dalam mekanisme surat perintah membayar (SPM-LS) dengan metode kualitatif. Metode kualitatif analisis dilakukan dengan cara mendiskripsikan fakta-fakta.

Fokus dan Dimensi Penelitian

Pada Penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Evaluasi Penerapan Pencairan Dana Langsung (LS) Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik. Agar penerapan pencairan dana langsung (LS) agar dapat di amati dan evaluasi perkembangannya agar kedisiplinan dan ketepatan waktu penyelesaian pencairan dana langsung tersebut berjalan sesuai mekanisme.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Data Kualitatif , data dan informasi yang di peroleh akan di analisis dengan analisis kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Data Primer
2. Data sekunder

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan dengan teknik:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Metode Analisis Data

Analisis data penelitian dari pengumpulan data berdasarkan observasi dan wawancara. Data hasil observasi dan wawancara diolah dan analisa secara kualitatif, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan anatar fenomena yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perusahaan

“Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gresik” atau lebih dikenal dengan singkatan (Disbudparpora) adalah merupakan perubahan nomenklatur Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam hal ini dinas dari yang semula “Dinas Pariwisata, Informasi dan Komunikasi” yang disingkat (Disparinkom) pada Tahun Anggaran 2009. Perubahan tersebut mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang me-merger Informasi dan Komunikasi (Infokom) yang notabene perwujudan dari “Dinas Penerangan” yang pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) satuan kerja tersebut dihapus karena dianggap kurang maksimal.

Hasil Penelitian

Hasil wawancara peneliti dengan seorang informan bendahara pengeluaran bagaimana sistem dan prosedur yang telah

diterapkan oleh dinas tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Fungsi yang terkait
2. Dokumen yang terkait
3. Catatan Akuntansi yang digunakan
4. Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5. Bagan Alir

Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut ini evaluasi pencairan dana langsung (LS) pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa :

1. Evaluasi terhadap Fungsi yang terkait
2. Evaluasi terhadap Dokumen yang terkait
3. Evaluasi terhadap catatan akuntansi yang digunakan
4. Evaluasi terhadap Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5. Evaluasi terhadap Bagan Alir
6. Evaluasi Unsur-unsur yang mempengaruhi pembayaran gaji

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik, maka dapat diambil kesimpulan ialah : Penerapan Pencairan Dana Langsung (LS) pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Tetapi masih ada beberapa kendala dalam proses penerbitan Surat Perintah Membayar Dana Langsung (SPM-LS) untuk Pencairan Belanja

Langsung Pengadaan Barang dan Jasa, diantaranya keterlambatan Penyelesaian Dokumen Kontrak.

Saran

Bagi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik sebaiknya, Pejabat Pembuat Komitmen harus memahami benar dan meneliti kelengkapan Dokumen Kontrak sebelum diserahkan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan demi kelancaran proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Dana Langsung (SPM-LS) Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga proses penerbitan Surat Perintah Membayar Dana Langsung (SPM-LS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa dapat segera terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Wuryan Editor : Indra Bastian. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesian Edisi 3*. Yogyakarta. BPFE.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik*. PT. Indeks.
- Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hoesada, Jan. 2016. *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia Legal Center Publishing Editor : Yudha Panndu. 2007. *Standart Akuntansi Pemerintah*. Jakarta. CV Karya Gemilang.
- Islahuzzaman. 2012. *Istilah-istilah Akuntansi dan Auditing*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Meliala, Tulis S., Niko Silitonga. Timbul Sinaga. 2007. *Akuntansi sektor Publik Edisi 2*. Jakarta. Semesta Media
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riyanto dan Puji Agus. 2015. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suwanda, Dadang dan Hendri Santosa. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis akrua Berpedoman Pada SAP*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sujarweni, V. Wiratna Editor : Mona. 2015. *Akuntansi Sektor Publik Teori Konsep Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kab Gresik Th. Anggaran 2015.
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kab Gresik Th. Anggaran 2015.

Portal Biro Sumber Daya Manusia – sekretariat jenderal – kementerian keuangan. Pengertian Gaji. <http://www.sdm.depkeu.go.id/manajemen.cfm?id=2> 3 Februari 2016.